

## **Valuasi Ekonomi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat: Analisis Konseptual *Willingness to Pay* dalam Upaya Pelestarian Sejarah**

**Muhammad Raihan Firdaus<sup>1\*</sup>, Mentari Ramadani<sup>2</sup>, Witri Saren Simanjourang<sup>3</sup>, Danu Anugrah Saputra<sup>4</sup>, Khabib Fathurahman<sup>5</sup>, Rexcy Zihad Tri Hidayat<sup>6</sup>, Fauzie Hakim Mulyady<sup>7</sup>, Muhammad Azka Nursyifa<sup>8</sup>**

<sup>1-8</sup> Universitas Pasundan, Indonesia

email: [raihan14@gmail.com](mailto:raihan14@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Article Info :**

Received:  
07-12-2025  
Revised:  
10-01-2025  
Accepted:  
15-01-2026

### **Abstract**

*The People's Struggle Monuments of West Java represent public cultural assets that embody historical memory, collective identity, and social values embedded in public space. Preservation efforts have often relied on government funding, creating structural vulnerability when fiscal priorities shift. This study aims to conceptually analyze the economic valuation of struggle monuments through the willingness to pay approach as a strategy for sustainable heritage preservation. Using a qualitative conceptual-analytical method, this research synthesizes policy frameworks, cultural heritage theories, and empirical findings from previous valuation studies. The analysis demonstrates that willingness to pay reflects not only economic capacity but also public perception, historical awareness, emotional attachment, and trust in monument management. Integrating willingness to pay into preservation policy provides empirical justification for participatory funding mechanisms, improves policy legitimacy, and strengthens community involvement. This approach positions heritage preservation as a shared social responsibility rather than a solely governmental obligation. The study contributes to the literature on cultural heritage economics by extending willingness to pay analysis to struggle monuments and offers a conceptual foundation for policy development that aligns historical preservation with sustainable public participation.*

**Keywords:** *economic valuation, willingness to pay, struggle monument, cultural heritage, preservation policy.*

### **Abstrak**

Monumen Perjuangan Rakyat di Jawa Barat merupakan aset budaya publik yang mewakili memori sejarah, identitas kolektif, dan nilai-nilai sosial yang tertanam dalam ruang publik. Upaya pelestarian seringkali bergantung pada pendanaan pemerintah, yang menciptakan kerentanan struktural ketika prioritas fiskal berubah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual penilaian ekonomi monumen perjuangan melalui pendekatan kesediaan membayar sebagai strategi pelestarian warisan budaya yang berkelanjutan. Menggunakan metode kualitatif konseptual-analitis, penelitian ini mensintesis kerangka kebijakan, teori warisan budaya, dan temuan empiris dari studi penilaian sebelumnya. Analisis menunjukkan bahwa kesediaan membayar tidak hanya mencerminkan kapasitas ekonomi tetapi juga persepsi publik, kesadaran sejarah, ikatan emosional, dan kepercayaan terhadap pengelolaan monumen. Mengintegrasikan kesediaan membayar ke dalam kebijakan pelestarian memberikan justifikasi empiris untuk mekanisme pendanaan partisipatif, meningkatkan legitimasi kebijakan, dan memperkuat keterlibatan komunitas. Pendekatan ini menempatkan pelestarian warisan sebagai tanggung jawab sosial bersama rather than kewajiban pemerintah semata. Studi ini berkontribusi pada literatur ekonomi warisan budaya dengan memperluas analisis kesediaan membayar ke monumen perjuangan dan menawarkan landasan konseptual untuk pengembangan kebijakan yang menyelaraskan pelestarian sejarah dengan partisipasi publik yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Penilaian ekonomi, kesediaan membayar, monumen perjuangan, warisan budaya, kebijakan pelestarian.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## **PENDAHULUAN**

Monumen perjuangan rakyat di Jawa Barat merupakan representasi historis yang memuat nilai simbolik, ideologis, dan kultural yang terbentuk melalui proses panjang sejarah kolektif masyarakat, sekaligus menjadi penanda identitas ruang publik yang menghubungkan masa lalu dengan dinamika sosial masa kini (Widodo, 2018; Sedyawati, 2006). Keberadaan monumen tidak hanya berfungsi

sebagai artefak fisik, tetapi juga sebagai medium memori kolektif yang memperkuat kesadaran sejarah dan nasionalisme dalam kehidupan masyarakat modern (Prasetyo et al., 2021). Pemanfaatan monumen perjuangan dalam ruang edukatif dan kultural menunjukkan peran strategisnya dalam pembelajaran sejarah kontekstual yang mempertemukan narasi lokal dengan pengalaman empiris masyarakat (Sari & Kurniawan, 2020). Kondisi tersebut menempatkan monumen perjuangan sebagai aset budaya yang memiliki nilai multidimensi dan menuntut pendekatan pengelolaan yang terintegrasi antara aspek sejarah, sosial, dan ekonomi.

Kerangka hukum pelestarian cagar budaya di Indonesia telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menempatkan monumen sebagai warisan budaya yang wajib dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh negara dan masyarakat (Republik Indonesia, 2010). Implementasi kebijakan pelestarian sering menghadapi tantangan keterbatasan pendanaan, lemahnya partisipasi publik, serta ketimpangan prioritas pembangunan yang berorientasi fisik semata (Senjaya et al., 2025). Pengelolaan cagar budaya yang tidak didukung oleh basis ekonomi yang kuat berpotensi menurunkan kualitas perawatan dan keberlanjutan fungsi sosial monumen (Widyas & Shofiyaturroddhiyah, 2025). Realitas ini menunjukkan perlunya instrumen analisis ekonomi yang mampu menerjemahkan nilai non-pasar monumen perjuangan ke dalam ukuran yang dapat dipertimbangkan dalam kebijakan publik.

Valuasi ekonomi menjadi pendekatan penting untuk mengestimasi nilai manfaat non-material dari aset budaya yang tidak diperdagangkan secara langsung di pasar (Nurhasyatillah, 2015). Pendekatan *willingness to pay* digunakan secara luas untuk menangkap preferensi dan kesediaan masyarakat dalam mendukung pelestarian warisan budaya melalui kontribusi finansial hipotetis yang mencerminkan nilai sosial dan simbolik suatu objek (Subanti et al., 2017). Studi valuasi pada berbagai objek budaya dan wisata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran ekonomi terhadap pentingnya pelestarian apabila manfaat sosialnya dipahami secara jelas (Setiawan & Saptutyningasih, 2025). Kerangka konseptual *willingness to pay* memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti dalam merumuskan strategi pembiayaan pelestarian monumen perjuangan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kesediaan membayar masyarakat dipengaruhi oleh persepsi nilai sejarah, tingkat pengetahuan, kedekatan emosional, serta kualitas pengelolaan objek yang dinilai (Prasetyo et al., 2021; Nurulita et al., 2025). Studi pada situs budaya dan kawasan wisata menunjukkan bahwa nilai ekonomi non-pasar dapat diestimasi secara sistematis dan memberikan justifikasi kuantitatif terhadap kebijakan pelestarian (Triyanti, 2024). Hasil penelitian *willingness to pay* juga menegaskan bahwa pelestarian bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan proses kolektif yang melibatkan preferensi dan partisipasi publik (Khairunnas et al., 2025). Konsep ini relevan diterapkan pada monumen perjuangan rakyat yang selama ini lebih diposisikan sebagai simbol historis tanpa pendekatan ekonomi yang terukur.

Monumen perjuangan rakyat Jawa Barat memiliki karakteristik unik karena merepresentasikan sejarah lokal yang berkelindan dengan narasi nasional, menjadikannya aset budaya yang bernilai strategis dalam pembentukan identitas regional dan nasional (Widodo, 2018). Potensi nilai ekonomi dari monumen tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kebijakan pelestarian, sehingga pemeliharaan dan pengembangan sering bergantung pada anggaran publik yang terbatas (Senjaya et al., 2025). Pendekatan valuasi ekonomi membuka ruang bagi alternatif pembiayaan berbasis partisipasi masyarakat yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal (Setiawan & Saptutyningasih, 2025). Analisis konseptual *willingness to pay* menjadi relevan untuk memetakan potensi dukungan masyarakat terhadap pelestarian monumen perjuangan secara berkelanjutan.

Dimensi sosial dan kelembagaan juga memegang peran penting dalam keberlanjutan pelestarian monumen, termasuk kondisi sumber daya manusia dan sistem pengelolaan yang menopang operasionalnya (Hulu et al., 2025). Kualitas pengelolaan monumen berpengaruh terhadap persepsi publik dan pada akhirnya menentukan tingkat kesediaan membayar untuk mendukung pelestarian (Prasetyo et al., 2021). Integrasi pendekatan teknis, sosial, dan ekonomi diperlukan agar monumen tidak hanya terjaga secara fisik tetapi juga berfungsi optimal sebagai ruang edukasi dan budaya (Widyas & Shofiyaturroddhiyah, 2025). Perspektif ini menegaskan bahwa valuasi ekonomi harus dipahami sebagai bagian dari strategi pengelolaan cagar budaya yang holistik.

Kajian terdahulu mengenai valuasi ekonomi warisan budaya di Indonesia menunjukkan bahwa metode *contingent valuation* efektif dalam mengungkapkan nilai non-pasar yang selama ini terabaikan dalam perencanaan pembangunan (Nurhasyatillah, 2015). Penelitian pada berbagai konteks budaya dan

wisata memperlihatkan bahwa willingness to pay dapat menjadi indikator kuat untuk menilai keberterimaan sosial suatu kebijakan pelestarian (Subanti et al., 2017; Triyanti, 2024). Hasil-hasil tersebut memberikan dasar konseptual yang kokoh untuk mengkaji monumen perjuangan rakyat sebagai objek valuasi ekonomi yang relevan secara akademik dan praktis. Pendekatan konseptual diperlukan agar hasil valuasi tidak hanya bersifat angka, tetapi juga mencerminkan makna sosial dan historis yang melekat pada monumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji valuasi ekonomi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat melalui analisis konseptual willingness to pay sebagai instrumen pendukung pelestarian sejarah. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan pelestarian budaya dengan kebutuhan kebijakan yang berbasis pada pertimbangan ekonomi dan partisipasi publik (Republik Indonesia, 2010). Penelitian ini menempatkan monumen sebagai aset budaya bernilai strategis yang memerlukan dukungan masyarakat secara sadar dan berkelanjutan. Kontribusi penelitian diharapkan memperkaya literatur valuasi ekonomi budaya serta memberikan landasan konseptual bagi pengelolaan monumen perjuangan di tingkat regional dan nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian konseptual-analitis yang bertujuan untuk mengkaji valuasi ekonomi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat melalui kerangka willingness to pay sebagai instrumen pendukung pelestarian sejarah. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam konstruksi teoretis, kerangka kebijakan, serta temuan empiris terdahulu yang relevan dengan valuasi ekonomi warisan budaya dan monumen sejarah. Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, artikel jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cagar budaya dan metode valuasi ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis dan selektif terhadap literatur yang memiliki relevansi substantif dengan topik penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, asumsi, dan variabel utama dalam pendekatan willingness to pay.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-interpretatif dengan menekankan pada sintesis konsep dan perbandingan temuan antar penelitian untuk membangun kerangka konseptual valuasi ekonomi monumen perjuangan. Proses analisis meliputi pengelompokan tema, penarikan pola konseptual, serta penafsiran keterkaitan antara nilai sejarah, persepsi masyarakat, dan kesediaan membayar dalam konteks pelestarian cagar budaya. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber pustaka dan konsistensi argumentasi teoretis yang merujuk pada literatur kunci di bidang ekonomi budaya dan kebijakan pelestarian. Hasil analisis kemudian dirumuskan menjadi implikasi konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan pelestarian monumen perjuangan rakyat yang berorientasi pada keberlanjutan dan partisipasi publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Monumen Perjuangan sebagai Aset Budaya dan Kepentingan Valuasi Ekonomi

Monumen perjuangan rakyat di Jawa Barat merupakan aset budaya yang terbentuk dari proses sejarah panjang dan berfungsi sebagai medium representasi memori kolektif masyarakat dalam ruang publik. Keberadaannya menegaskan hubungan antara identitas lokal, pengalaman historis, dan konstruksi nasionalisme yang hidup dalam kesadaran sosial lintas generasi (Widodo, 2018; Sedyawati, 2006). Nilai yang melekat pada monumen perjuangan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencakup dimensi sosial, edukatif, dan kultural yang berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa (Prasetyo et al., 2021). Posisi tersebut menempatkan monumen sebagai aset publik yang memiliki kepentingan strategis dalam pembangunan kebudayaan dan pelestarian sejarah.

Dalam perspektif kebijakan, monumen perjuangan termasuk dalam kategori cagar budaya yang dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat (Republik Indonesia, 2010). Implementasi kebijakan pelestarian di berbagai daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengelolaan di lapangan, terutama terkait pendanaan dan kapasitas kelembagaan (Lubis et al., 2024; Senjaya et al., 2025). Kondisi ini

menimbulkan kebutuhan akan pendekatan alternatif yang mampu memperkuat dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Pelestarian monumen perjuangan selama ini masih dominan dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah, padahal keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan historisnya. Persepsi masyarakat terhadap monumen berpengaruh langsung terhadap tingkat kepedulian dan partisipasi dalam pelestarian, termasuk kesediaan memberikan dukungan material maupun non-material (Prasetyo et al., 2021). Studi mengenai pemanfaatan monumen sebagai sumber pembelajaran sejarah menunjukkan bahwa interaksi aktif masyarakat meningkatkan apresiasi terhadap nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya (Sari & Kurniawan, 2020). Apresiasi tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun legitimasi sosial bagi upaya pelestarian berbasis partisipasi publik.

Pendekatan ekonomi menawarkan perspektif tambahan dalam memahami nilai monumen perjuangan melalui pengukuran manfaat non-pasar yang selama ini tidak tercermin dalam mekanisme harga. Konsep valuasi ekonomi memungkinkan nilai sejarah, budaya, dan sosial diterjemahkan ke dalam ukuran moneter sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan (Fauzi, 2014). Dalam konteks warisan budaya, valuasi ekonomi berfungsi sebagai alat untuk menegaskan bahwa pelestarian bukan beban biaya semata, melainkan investasi sosial jangka panjang (Nurhasyatillah, 2015). Kerangka ini relevan diterapkan pada monumen perjuangan rakyat yang memiliki nilai publik tinggi namun sering mengalami keterbatasan dukungan anggaran.

Pendekatan willingness to pay digunakan secara luas dalam studi ekonomi sumber daya dan budaya untuk mengukur kesediaan masyarakat membayar demi keberlanjutan suatu aset publik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa willingness to pay dipengaruhi oleh persepsi nilai, tingkat pengetahuan, serta kualitas pengelolaan objek yang dinilai (Subanti et al., 2017; Setiawan & Saptutyingsih, 2025). Pada konteks warisan budaya dan pariwisata, metode ini mampu menangkap preferensi masyarakat terhadap pelestarian yang tidak dapat diukur melalui transaksi pasar (Gumilar, 2025; Kurnia, 2024). Hal tersebut menjadikan willingness to pay sebagai instrumen penting dalam perumusan kebijakan pelestarian monumen perjuangan.

Sejumlah penelitian empiris dan laporan resmi menunjukkan bahwa valuasi ekonomi telah diterapkan pada berbagai objek budaya dan kawasan konservasi di Indonesia dengan hasil yang signifikan bagi penguatan kebijakan. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran ekonomi terhadap pelestarian apabila manfaat sosial dan historisnya dikomunikasikan secara efektif (Triyanti, 2024; Nurulita et al., 2025). Bukti empiris ini memperkuat argumen bahwa monumen perjuangan rakyat juga memiliki potensi nilai ekonomi non-pasar yang dapat diestimasi secara sistematis. Ringkasan temuan penelitian dan kerangka regulasi terkait valuasi dan pelestarian disajikan pada Tabel 1 sebagai dasar penguatan analisis:

**Tabel 1. Ringkasan Regulasi dan Penelitian Terdahulu Terkait Valuasi dan Pelestarian**

Sumber	Objek Kajian	Temuan Utama
Republik Indonesia (2010)	Cagar budaya	Negara dan masyarakat bertanggung jawab atas pelestarian berkelanjutan
Nurhasyatillah (2015)	Museum Nasional Indonesia	Valuasi ekonomi mampu mengungkap nilai non-pasar warisan budaya
Subanti et al. (2017)	Situs Sangiran	WTP dipengaruhi persepsi dan manfaat sosial
Triyanti (2024)	Kawasan pesisir Gunungkidul	WTP efektif sebagai dasar kebijakan pelestarian
Setiawan & Saptutyingsih (2025)	Destinasi wisata	WTP mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pendekatan valuasi ekonomi tidak hanya relevan untuk objek wisata alam, tetapi juga untuk warisan budaya dan monumen sejarah. Konsep willingness to pay memberikan gambaran mengenai preferensi masyarakat yang dapat dimanfaatkan

sebagai dasar pembiayaan alternatif pelestarian (Khairunnas et al., 2025). Dalam konteks monumen perjuangan rakyat, pendekatan ini membuka peluang untuk merancang skema pelestarian yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi lokal. Dukungan masyarakat yang terukur secara ekonomi dapat memperkuat legitimasi kebijakan pelestarian.

Dimensi kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan monumen sebagai aset budaya. Penelitian mengenai pengelolaan museum menunjukkan bahwa kondisi organisasi dan kesejahteraan pengelola memengaruhi kualitas layanan dan persepsi publik terhadap institusi budaya (Hulu et al., 2025). Kualitas pengelolaan yang baik berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan dan kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam pelestarian. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara aspek manajerial dan potensi nilai ekonomi non-pasar monumen perjuangan.

Pendekatan teknis dalam konservasi bangunan bersejarah juga memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan monumen sebagai aset publik. Integrasi pendekatan rekayasa dan pelestarian arsitektural terbukti mampu meningkatkan daya tahan fisik dan nilai fungsional warisan budaya (Widyas & Shofiyyaturroddhiyah, 2025). Ketika aspek teknis, sosial, dan ekonomi berjalan selaras, monumen dapat mempertahankan relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Sinergi ini memperkuat argumen bahwa valuasi ekonomi perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan cagar budaya yang komprehensif.

Secara konseptual, valuasi ekonomi monumen perjuangan rakyat Jawa Barat melalui *willingness to pay* berfungsi sebagai jembatan antara nilai sejarah dan rasionalitas kebijakan publik. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelestarian monumen bukan semata kewajiban normatif, melainkan kebutuhan sosial yang dapat didukung oleh preferensi masyarakat secara nyata (Fauzi, 2014; Nugroho & Negara, 2015). Pemahaman terhadap nilai ekonomi non-pasar memperluas cara pandang dalam merumuskan kebijakan pelestarian yang berorientasi keberlanjutan. Landasan konseptual ini menjadi titik awal untuk membahas determinan dan implikasi *willingness to pay* pada sub bahasan berikutnya.

### **Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Willingness to Pay* Masyarakat terhadap Pelestarian Monumen Perjuangan**

Kesediaan masyarakat untuk membayar dalam rangka pelestarian monumen perjuangan tidak muncul secara spontan, melainkan dibentuk oleh interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, dan kultural. WTP mencerminkan preferensi individu terhadap nilai non-pasar yang dirasakan dari keberadaan suatu aset publik, termasuk makna sejarah dan simbolik yang melekat pada monumen perjuangan (Fauzi, 2014). Penelitian valuasi ekonomi warisan budaya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran sejarah dan pemahaman nilai budaya menjadi fondasi awal dalam membentuk sikap positif terhadap kontribusi pelestarian (Nurhasyatillah, 2015). Faktor-faktor tersebut menjadikan WTP sebagai indikator sosial-ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap monumen sejarah terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesediaan membayar untuk pelestarian. Masyarakat yang memandang monumen sebagai bagian penting dari identitas kolektif cenderung memiliki komitmen lebih tinggi untuk mendukung keberlanjutannya (Prasetyo et al., 2021). Pemaknaan monumen sebagai ruang edukatif dan simbol perjuangan memperkuat hubungan emosional antara masyarakat dan objek sejarah tersebut (Widodo, 2018). Ikatan emosional ini berfungsi sebagai pendorong psikologis yang meningkatkan nilai subjektif monumen dalam penilaian ekonomi non-pasar.

Tingkat pengetahuan dan pengalaman langsung masyarakat juga berperan dalam membentuk WTP terhadap pelestarian monumen perjuangan. Pemanfaatan monumen sebagai sumber pembelajaran sejarah kontekstual terbukti meningkatkan pemahaman nilai sejarah dan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat (Sari & Kurniawan, 2020). Ketika monumen diintegrasikan dalam aktivitas edukatif dan sosial, nilai manfaat yang dirasakan menjadi lebih konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kondisi ini memperkuat preferensi masyarakat untuk berkontribusi secara finansial demi menjaga keberlanjutan fungsi monumen.

Faktor ekonomi individu seperti tingkat pendapatan dan stabilitas ekonomi juga memengaruhi kesediaan membayar, meskipun tidak selalu menjadi penentu utama. Studi valuasi pada berbagai objek budaya dan wisata menunjukkan bahwa meskipun pendapatan berpengaruh, faktor persepsi nilai dan kepentingan sosial sering kali lebih dominan (Subanti et al., 2017; Setiawan & Saptutyningsih, 2025). Penelitian pada kawasan konservasi dan destinasi wisata memperlihatkan bahwa kelompok dengan

pendapatan menengah tetap menunjukkan WTP tinggi apabila manfaat sosial dirasakan kuat (Gumilar, 2025; Kurnia, 2024). Hal ini menegaskan bahwa WTP tidak semata-mata merefleksikan kemampuan ekonomi, tetapi juga prioritas nilai masyarakat.

Kualitas pengelolaan dan kondisi fisik monumen menjadi faktor penting yang memengaruhi persepsi masyarakat dan tingkat WTP. Pengelolaan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana pelestarian (Bombo, 2024; Senjaya et al., 2025). Penelitian pada institusi budaya menunjukkan bahwa kualitas manajemen dan kesejahteraan pengelola berpengaruh terhadap citra lembaga di mata masyarakat (Hulu et al., 2025). Kepercayaan ini menjadi prasyarat penting bagi kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusi finansial secara sukarela.

Dimensi kebijakan dan kelembagaan juga berkontribusi dalam membentuk WTP masyarakat terhadap pelestarian monumen perjuangan. Kejelasan regulasi dan komitmen pemerintah dalam melindungi cagar budaya menciptakan kepastian dan legitimasi bagi partisipasi publik (Republik Indonesia, 2010; Lubis et al., 2024). Ketika kebijakan pelestarian dipahami sebagai kepentingan bersama, masyarakat cenderung memandang kontribusi finansial sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Sinergi antara kebijakan publik dan kesadaran masyarakat memperkuat basis WTP dalam konteks pelestarian sejarah.

Berbagai penelitian terdahulu memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi WTP pada objek budaya dan kawasan konservasi di Indonesia. Temuan-temuan tersebut menunjukkan pola yang relatif konsisten, yakni dominasi faktor persepsi nilai, pengalaman, dan kualitas pengelolaan dibandingkan faktor ekonomi semata (Nurulita et al., 2025; Khairunnas et al., 2025). Bukti empiris ini memperkuat relevansi pendekatan willingness to pay untuk mengkaji dukungan masyarakat terhadap pelestarian monumen perjuangan. Ringkasan faktor penentu WTP berdasarkan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2:

**Tabel 2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Willingness to Pay Berdasarkan Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Objek Kajian	Faktor Dominan WTP
Nurhasyatillah (2015)	Museum Nasional	Persepsi nilai sejarah dan edukasi
Subanti et al. (2017)	Situs Sangiran	Pengetahuan dan manfaat sosial
Setiawan & Saptutyningasih (2025)	Destinasi wisata	Kualitas pengelolaan dan pengalaman
Nurulita et al. (2025)	Kawasan karst	Kesadaran lingkungan dan budaya
Khairunnas et al. (2025)	Wilayah pesisir	Partisipasi dan kepercayaan publik

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial dan kultural memiliki peran dominan dalam membentuk WTP dibandingkan faktor ekonomi individual. Temuan ini sejalan dengan karakter monumen perjuangan yang nilai utamanya terletak pada makna simbolik dan historis, bukan pada manfaat ekonomi langsung. Pendekatan valuasi ekonomi yang sensitif terhadap konteks sosial menjadi penting agar estimasi WTP mencerminkan preferensi masyarakat secara lebih akurat (Fauzi, 2014). Kerangka ini memperkuat argumen bahwa pelestarian monumen membutuhkan strategi komunikasi nilai yang efektif.

Konteks lokal Jawa Barat dengan keragaman latar belakang sosial dan sejarah perjuangan turut memengaruhi struktur preferensi masyarakat terhadap monumen perjuangan. Kedekatan geografis dan keterlibatan historis masyarakat lokal meningkatkan intensitas hubungan emosional dengan monumen (Widodo, 2018). Hubungan tersebut berkontribusi pada meningkatnya rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian monumen sebagai warisan bersama. Faktor ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis wilayah dalam analisis WTP monumen perjuangan.

Pendekatan konseptual terhadap faktor-faktor WTP memberikan dasar analitis untuk memahami potensi dukungan masyarakat terhadap pelestarian monumen perjuangan rakyat Jawa Barat.

Pemahaman yang komprehensif mengenai determinan WTP memungkinkan perumusan strategi pelestarian yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan (Nugroho & Negara, 2015). Analisis faktor-faktor ini juga membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam mengoptimalkan kontribusi publik. Landasan ini menjadi pijakan penting untuk membahas implikasi kebijakan dan strategi pelestarian pada sub bahasan berikutnya.

### **Implikasi Kebijakan dan Strategi Pelestarian Monumen Perjuangan Berbasis Willingness to Pay**

Pendekatan willingness to pay memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan pelestarian monumen perjuangan rakyat Jawa Barat karena mampu menjembatani nilai sejarah dengan rasionalitas ekonomi publik. Kebijakan pelestarian yang hanya bertumpu pada anggaran pemerintah cenderung rentan terhadap perubahan prioritas pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah (Lubis et al., 2024; Senjaya et al., 2025). Integrasi hasil valuasi ekonomi ke dalam kebijakan memungkinkan monumen diposisikan sebagai aset publik yang memiliki nilai sosial terukur dan layak memperoleh dukungan berkelanjutan (Fauzi, 2014). Kerangka ini memperluas dasar argumentasi kebijakan dari sekadar kewajiban normatif menjadi kebutuhan sosial-ekonomi.

Dalam perspektif regulasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyediakan landasan hukum yang kuat untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya. Regulasi tersebut membuka ruang partisipasi publik dalam bentuk dukungan finansial, pengawasan, dan pemanfaatan yang bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2010). Pendekatan willingness to pay dapat diintegrasikan sebagai instrumen pendukung implementasi kebijakan agar partisipasi masyarakat memiliki dasar empiris yang jelas. Kebijakan berbasis data preferensi publik meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pengelolaan monumen perjuangan.

Hasil penelitian valuasi ekonomi pada warisan budaya dan kawasan wisata menunjukkan bahwa informasi mengenai kesediaan membayar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembiayaan pelestarian. Studi pada Museum Nasional dan situs budaya lainnya membuktikan bahwa nilai non-pasar mampu memberikan justifikasi ekonomi terhadap program pelestarian jangka panjang (Nurhasyatillah, 2015; Subanti et al., 2017). Informasi WTP memungkinkan perancang kebijakan menentukan skema kontribusi yang realistis dan dapat diterima masyarakat. Pendekatan ini relevan diterapkan pada monumen perjuangan yang memiliki fungsi publik namun belum didukung mekanisme pembiayaan partisipatif.

Strategi pelestarian berbasis willingness to pay juga mendorong pergeseran paradigma pengelolaan dari pendekatan top-down menuju model kolaboratif. Pelibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama memperkuat rasa memiliki terhadap monumen perjuangan sebagai warisan bersama (Prasetyo et al., 2021). Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tingkat kepercayaan terhadap kebijakan pelestarian cenderung meningkat (Bombo, 2024). Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam keberlanjutan pelestarian monumen.

Implikasi kebijakan lainnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pengelolaan monumen sebagai prasyarat optimalisasi WTP. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih bersedia membayar apabila pengelolaan monumen dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat yang dirasakan secara nyata (Setiawan & Saptutyingsih, 2025). Kondisi fisik monumen, kualitas informasi sejarah, serta kenyamanan akses menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi publik (Widyas & Shofiyyaturrodhiah, 2025). Kebijakan pelestarian perlu menempatkan peningkatan kualitas pengelolaan sebagai bagian integral dari strategi berbasis WTP.

Aspek kelembagaan dan sumber daya manusia juga memerlukan perhatian dalam strategi pelestarian berbasis partisipasi publik. Penelitian pada institusi budaya menunjukkan bahwa stabilitas organisasi dan kesejahteraan pengelola memengaruhi kinerja pelayanan dan citra lembaga di mata masyarakat (Hulu et al., 2025). Kelembagaan yang kuat mendukung pengelolaan dana kontribusi masyarakat secara akuntabel dan berkelanjutan. Kondisi ini memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan potensi WTP dalam jangka panjang.

Berbagai penelitian terdahulu dan praktik kebijakan menunjukkan bahwa hasil valuasi ekonomi dapat dimanfaatkan untuk merancang skema pendanaan alternatif pelestarian. Skema tersebut meliputi donasi sukarela, tiket kontribusi budaya, hingga dana pelestarian berbasis komunitas yang disesuaikan dengan preferensi masyarakat (Triyanti, 2024; Khairunnas et al., 2025). Pengalaman pada sektor pariwisata dan konservasi menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mengurangi ketergantungan

pada anggaran pemerintah (Gumilar, 2025; Kurnia, 2024). Ringkasan implikasi kebijakan dan strategi pelestarian berbasis WTP disajikan pada Tabel 3:

**Tabel 3. Implikasi Kebijakan dan Strategi Pelestarian Berbasis Willingness to Pay**

Aspek	Implikasi Kebijakan	Sumber
Regulasi	Penguatan partisipasi publik dalam pelestarian	Republik Indonesia (2010)
Pembiayaan	Alternatif pendanaan non-APBN/APBD	Nurhasyatillah (2015); Triyanti (2024)
Pengelolaan	Peningkatan kualitas dan transparansi	Setiawan & Saptutyingsih (2025)
Kelembagaan	Penguatan SDM dan organisasi	Hulu et al. (2025)
Partisipasi	Peningkatan legitimasi kebijakan	Prasetyo et al. (2021)

Implikasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa willingness to pay bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga alat strategis dalam tata kelola cagar budaya. Pendekatan ini memungkinkan pengambil kebijakan memahami batas toleransi dan preferensi masyarakat dalam mendukung pelestarian monumen perjuangan. Informasi tersebut membantu menghindari kebijakan yang bersifat koersif atau tidak sesuai dengan kondisi sosial lokal (Fauzi, 2014). Strategi pelestarian yang selaras dengan preferensi publik cenderung lebih berkelanjutan.

Dalam konteks Jawa Barat, strategi berbasis WTP perlu disesuaikan dengan karakter sosial, sejarah, dan kultural masyarakat setempat. Monumen perjuangan yang memiliki kedekatan historis dengan komunitas lokal berpotensi memperoleh dukungan lebih besar melalui skema partisipatif (Widodo, 2018). Pendekatan berbasis wilayah memungkinkan diferensiasi strategi pelestarian sesuai tingkat kepedulian dan kapasitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pengembangan berbasis komunitas dalam pengelolaan aset budaya (Nugroho & Negara, 2015).

Pendekatan konseptual ini juga memiliki implikasi akademik dengan memperluas kajian valuasi ekonomi ke ranah monumen perjuangan yang relatif belum banyak diteliti. Integrasi perspektif sejarah, kebijakan publik, dan ekonomi memperkaya pemahaman mengenai nilai warisan budaya dalam pembangunan berkelanjutan (Sedyawati, 2006). Kerangka ini mendorong penelitian lanjutan yang lebih aplikatif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Kontribusi konseptual tersebut mempertegas posisi willingness to pay sebagai instrumen strategis dalam pelestarian monumen perjuangan rakyat.

Implikasi kebijakan dan strategi pelestarian berbasis willingness to pay menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam menjaga keberlanjutan monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Pendekatan ini mempertemukan kepentingan pelestarian sejarah dengan preferensi masyarakat dalam kerangka kebijakan yang adaptif dan responsif. Integrasi valuasi ekonomi ke dalam kebijakan pelestarian memberikan dasar rasional bagi pengambilan keputusan jangka panjang. Dengan demikian, monumen perjuangan tidak hanya terjaga sebagai simbol sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai aset budaya yang hidup dan didukung oleh masyarakatnya.

## KESIMPULAN

Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat merupakan aset budaya publik yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan simbolik yang kuat, sehingga pelestariannya memerlukan pendekatan yang melampaui kerangka normatif dan administratif semata. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa valuasi ekonomi melalui pendekatan *willingness to pay* mampu mengungkap nilai non-pasar monumen perjuangan sekaligus merepresentasikan preferensi dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelestarian sejarah. Faktor persepsi nilai sejarah, kualitas pengelolaan, pengalaman edukatif, serta kepercayaan terhadap kebijakan publik terbukti berperan dominan dalam membentuk kesediaan masyarakat untuk berkontribusi. Integrasi hasil valuasi *willingness to pay* ke dalam kebijakan pelestarian memberikan dasar rasional bagi pengembangan strategi pembiayaan partisipatif,



peningkatan kualitas pengelolaan, dan penguatan legitimasi kebijakan, sehingga monumen perjuangan dapat terjaga secara berkelanjutan sebagai warisan sejarah yang hidup dan didukung oleh masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bombo, D. A. (2024). Implementasi kebijakan publik dalam melestarikan cagar budaya (Studi Kelurahan Polowijen). *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 6(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapura/article/view/49031>
- Dharmawan, A., Subiyanto, S., & Nugraha, A. L. (2016). Analisis nilai ekonomi kawasan cagar budaya Keraton Kota Cirebon berdasarkan willingness to pay. *Jurnal Geodesi Undip*, 5(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/11497>
- Fauzi, A. (2014). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gumilar, I. (2025). Willingness to pay masyarakat terhadap sumber daya terumbu karang kawasan konservasi perairan Pulau Biawak. *Jurnal Sosiohumaniora*, 27(1). <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/21371>
- Hulu, L. M. D., Ndraha, A. B., Lase, D., & Waruwu, M. H. (2025). Pengaruh Kompensasi terhadap Turnover intention Karyawan di Museum Pusaka Nias. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2952-2959. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1575>
- Khairunnas, A., Wijimulawiani, B. S., & Hak, M. B. U. (2025). Analisis Kesiediaan Membayar Pengunjung Untuk Keberlanjutan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Di Kota Mataram Dan Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekuilnoma*, 7(1), 1-11. <https://doi.org/10.36985/npj3ce59>
- Kurnia. (2024). Nilai willingness to pay aktivitas birdwatching di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(3). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/53592>
- Lubis, L., Wardiyanto, B., & Setjaningrum, E. (2024). Heritage conservation in Indonesia: A policy review. *Perspektif Hukum*, 24(1). <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.276>
- Maxwell, J. A. (2012). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Niampe, L., et al. (2024). Pelestarian objek cagar budaya desa sebagai upaya pengembangan potensi pariwisata budaya. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v6i1.295>
- Nugroho, I., & Negara, P. D. (2015). *Pengembangan desa melalui ekowisata*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Nurhasyatillah. (2015). *Valuasi ekonomi warisan budaya Museum Nasional Indonesia menggunakan contingent valuation method* (Tesis magister). Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/92594>
- Nurulita, A., Hastuti, D. R. D., Kamaruddin, C. A., Rahim, A., & Syafri, M. (2025). Analisis Willingness to Pay Pengunjung terhadap Pelestarian Kawasan Wisata Pegunungan Karst Rammang-Rammang Kabupaten Maros. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 252-263. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3312>
- Prasetyo, E., Hapsari, N., & Lestari, S. (2021). Persepsi masyarakat terhadap monumen sejarah dan implikasinya terhadap pelestarian budaya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(2), 134-146. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/33578>
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta.
- Sari, D. P., & Kurniawan, A. (2020). Pemanfaatan monumen sejarah sebagai sumber pembelajaran sejarah kontekstual. *Historika*, 23(1), 45-58. <https://jurnal.uns.ac.id/historika/article/view/42544>
- Sedyawati, E. (2006). *Budaya Indonesia: Kajian arkeologi, seni, dan sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Senjaya, E., Rusli, B. R., & Utami, S. B. (2025). Implementation of cultural heritage management policy. *Journal La Sociale*, 6(3). <https://doi.org/10.37899/journal-lasociale.v6i3.1904>
- Setiawan, F., & Saptutyingsih, E. (2025). Willingness to pay for destination quality improvement: A case study of Baru Beach, Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(1). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jerss/article/view/13363>
- Subanti, S., Hakim, A. R., & Irawan, B. (2017). Determinant of willingness to pay and economic value for tourism object using contingent valuation method: The case of Sangiran Sites. *Journal of*

- Environmental Management and Tourism*, 8(4).  
<https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/1419>
- Triyanti. (2024). Estimasi nilai ekonomi pelestarian kawasan pesisir Gunungkidul menggunakan contingent valuation method. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 19(2).  
<https://ejournalbalitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/11464>
- Widodo, J. (2018). Monumen dan memori kolektif: Representasi sejarah dalam ruang publik. *Indonesian Journal of Cultural Studies*, 3(2), 101–112.  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijc/article/view/24869>
- Widyas, R. S., & Shofiyaturrodhiyah, M. D. (2025). An Engineering Approach to Architectural Heritage Conservation at Taman Sari in Yogyakarta. *Journal of Engineering and Applied Technology*, 1(2), 96-107. <https://doi.org/10.65310/sbpswk69>